

CORPORATE GOVERNANCE MEMODERASI PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP EFEKTIVITAS PAJAK KARBON

Gloria Priscilla Simorangkir^{1*}, Nera Marinda Machdar²
gloriaprisilla97@gmail.com¹, nmachdar@gmail.com²

¹Universitas Kristen Indonesia

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Corresponding email: gloriaprisilla97@gmail.com

Abstrak: Penerapan pajak karbon sebagai instrumen pengendalian emisi telah menjadi sorotan utama dalam kebijakan fiskal lingkungan di Indonesia sejak tahun 2022. Sektor energi, sebagai kontributor terbesar emisi karbon, menjadi objek penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh green accounting, sustainability report, dan environmental performance terhadap efektivitas pajak karbon dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan sustainability report perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014–2024. Analisis dilakukan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa green accounting dan sustainability report berpengaruh positif terhadap efektivitas pajak karbon, sedangkan environmental performance juga memperkuat mekanisme akuntabilitas perusahaan dalam merespons kebijakan fiskal lingkungan. Selain itu, corporate governance terbukti memperkuat hubungan antara variabel-variabel pelaporan lingkungan dan efektivitas pajak karbon. Perusahaan dengan tata kelola yang baik menunjukkan transparansi yang lebih tinggi, kepatuhan fiskal yang lebih kuat, serta strategi keberlanjutan yang lebih terarah. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pelaporan keberlanjutan dan sistem tata kelola dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pajak karbon di sektor energi Indonesia.

Kata Kunci: Green Accounting, Sustainability Report, Environmental Performance, Pajak Karbon, Corporate Governance

Abstract: The implementation of carbon tax as an emission control instrument has become a major focus in Indonesia's environmental fiscal policy since 2022. The energy sector, being the largest contributor to carbon emissions, serves as a critical target in climate change mitigation efforts. This study aims to analyze the influence of green accounting, sustainability reporting, and environmental performance on the effectiveness of the carbon tax, with corporate governance as a moderating variable. A quantitative approach is applied in this research, using secondary data obtained from annual reports and sustainability reports of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2014–2024 period. The analysis is conducted using the Moderated Regression Analysis (MRA) method. The results indicate that green accounting and sustainability reporting have a positive effect on the effectiveness of the carbon tax, while environmental performance further strengthens corporate accountability mechanisms in responding to environmental fiscal policies. Additionally, corporate governance is found to enhance the relationship between environmental reporting variables and carbon tax effectiveness. Companies with strong governance exhibit higher transparency, stronger fiscal compliance, and more strategic sustainability initiatives. These findings highlight the importance of integrating sustainability reporting with governance systems to improve the effectiveness of carbon tax policy in Indonesia's energy sector.

Keywords: Green Accounting, Sustainability Report, Environmental Performance, Carbon Tax, Corporate Governance

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata yang memengaruhi ekosistem global secara menyeluruh. Peningkatan suhu bumi, mencairnya es kutub, dan meningkatnya intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan adalah dampak langsung dari emisi karbon dioksida (CO₂) yang berasal dari aktivitas manusia, terutama dari sektor industri energi (IPCC, 2021). Dalam konteks ini, sektor energi merupakan penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia, mencapai lebih dari 60% dari total emisi nasional (IEA, 2023). Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengadopsi berbagai kebijakan lingkungan, salah satunya melalui instrumen fiskal berupa pajak karbon.

Pajak karbon di Indonesia diperkenalkan secara resmi pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai langkah strategis dalam upaya pengendalian emisi dan transisi menuju ekonomi hijau (Kementerian Keuangan RI, 2022). Pajak ini bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas industri yang menghasilkan emisi. Pajak karbon juga menjadi bagian penting dalam strategi pencapaian komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dalam kerangka Paris Agreement. Dalam pelaksanaannya, pajak karbon tidak hanya diposisikan sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai insentif ekonomi untuk mendorong perusahaan beralih ke proses produksi yang lebih ramah lingkungan.

Namun demikian, efektivitas kebijakan pajak karbon dalam menekan emisi dan mendorong perubahan perilaku korporasi sangat tergantung pada kualitas pelaporan dan tata kelola perusahaan. Di sinilah peran green accounting dan sustainability report menjadi relevan. Green accounting merupakan pendekatan akuntansi yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan biaya lingkungan yang timbul dari aktivitas bisnisnya, seperti pengolahan limbah, efisiensi energi, dan emisi karbon (Ditz, Ranganathan, & Banks, 1995). Sementara itu, sustainability report adalah laporan non-keuangan yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG (GRI, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan green accounting dan penyusunan sustainability report pada perusahaan energi masih belum merata dan menghadapi berbagai tantangan. Sebagai contoh, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mencatat penurunan pendapatan sebesar 27% pada tahun 2020, yang menunjukkan kerentanan sektor batu bara terhadap tekanan lingkungan global (Adaro Annual Report, 2020). Meski telah memulai proyek energi terbarukan dan menyusun sustainability report, perusahaan ini masih menghadapi tantangan dalam dokumentasi dan pelaporan strategi dekarbonisasi. Di sisi lain, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menunjukkan komitmen kuat melalui pelaporan keberlanjutan dan penerapan green accounting. Namun, kualitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan ini belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas lingkungan yang ditetapkan, sehingga efektivitas pajak karbon tetap menjadi pertanyaan (PTBA Sustainability Report, 2022).

Masalah tata kelola perusahaan juga menjadi aspek penting yang dapat memengaruhi efektivitas pelaporan lingkungan dan kepatuhan terhadap pajak karbon. Kasus PT Bumi Resources Tbk (BUMI), yang mengalami krisis tata kelola dan transparansi laporan keuangan pada 2013–2014, menjadi bukti bagaimana lemahnya corporate governance dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas perusahaan dalam mengelola isu lingkungan. Corporate governance yang baik, yang mencakup struktur dewan independen, komite audit, dan sistem pengawasan internal, diyakini mampu meningkatkan kualitas pelaporan lingkungan dan efektivitas kebijakan fiskal seperti pajak karbon (Baron & Kenny, 1986; Machdar & Santosa, 2021).

Penelitian sebelumnya juga mengindikasikan pentingnya keterpaduan antara green accounting, sustainability report, dan tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungan. Penelitian Gisca & Machdar (2024) menyatakan bahwa pengungkapan keberlanjutan dan green accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun tidak secara spesifik menguji pengaruhnya terhadap efektivitas pajak karbon. Begitu pula dengan studi Saputra & Windyastuti (2024), yang menemukan pengaruh positif dari green accounting dan sustainability report terhadap nilai perusahaan, tetapi belum memasukkan corporate governance sebagai variabel moderasi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam kajian akademik yang perlu diisi, khususnya dalam konteks kebijakan fiskal berbasis emisi di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara praktik green accounting, penyusunan sustainability report, dan kinerja

lingkungan terhadap efektivitas pajak karbon, dengan mempertimbangkan corporate governance sebagai variabel moderasi. Dengan mengkaji perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran penting pelaporan lingkungan dan tata kelola perusahaan dalam mendukung kebijakan fiskal berwawasan lingkungan. Efektivitas pajak karbon dalam penelitian ini diukur melalui rasio total pajak karbon yang dibayarkan terhadap total emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana perusahaan menginternalisasi dampak lingkungannya melalui mekanisme fiskal. Dengan kata lain, semakin besar rasio tersebut, semakin tinggi tingkat kontribusi perusahaan dalam mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Selain itu, penggunaan data dari PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai indikator kinerja lingkungan akan memperkaya dimensi analisis mengenai keberhasilan penerapan kebijakan ini pada tingkat korporasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui sejauh mana corporate governance memengaruhi hubungan antara green accounting, sustainability report, dan environmental performance terhadap efektivitas pajak karbon. Penggunaan metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi interaksi kompleks antarvariabel dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademik dalam mengisi celah literatur mengenai efektivitas kebijakan fiskal berbasis lingkungan di Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun regulasi lanjutan yang lebih adaptif dan akuntabel dalam implementasi pajak karbon. Sedangkan bagi perusahaan, penelitian ini mendorong pentingnya integrasi pelaporan keberlanjutan dan sistem akuntansi hijau dalam strategi bisnis mereka. Di sisi lain, bagi kalangan akademisi dan peneliti, temuan dari studi ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan teori akuntansi lingkungan dan tata kelola perusahaan berbasis keberlanjutan.

LANDASAN TEORI

Tabel 1. Landasan Teori Penelitian

No	Uraian	Keterangan
1	Teori Eksternalitas dan Internalisasi Eksternalitas	Dikemukakan oleh Arthur Cecil Pigou (1920), menyatakan bahwa eksternalitas negatif seperti polusi dapat diatasi melalui mekanisme pajak, agar pelaku ekonomi menginternalisasi dampak sosial dari kegiatannya. Relevan sebagai dasar teori dari variabel Efektivitas Pajak Karbon.
2	Green Accounting Theory	Menurut Ditz, Ranganathan & Banks (1995), green accounting mencatat dan melaporkan biaya dan dampak lingkungan perusahaan secara sistematis. Teori ini digunakan untuk menjelaskan variabel Green Accounting.
3	Triple Bottom Line Reporting	Diperkenalkan oleh Elkington (1997), mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (ESG) dalam pelaporan keberlanjutan. Relevan untuk menjelaskan variabel Sustainability Report.
4	Environmental Performance Theory	Mengukur sejauh mana perusahaan mengelola dampak lingkungannya melalui indikator seperti emisi karbon, efisiensi energi, dan kepatuhan terhadap regulasi (Wiseman, 1982). Relevan untuk menjelaskan variabel Environmental Performance.
5	Agency Theory dan Corporate Governance	Diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan pentingnya pengawasan manajemen melalui struktur tata kelola yang baik (komisaris independen, komite audit) untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pajak karbon. Digunakan sebagai teori moderasi Corporate Governance.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif untuk menguji pengaruh green accounting, sustainability report, dan environmental performance terhadap efektivitas pajak karbon, serta peran corporate governance sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan peringkat PROPER perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014–2024. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria: konsistensi penyusunan laporan tahunan dan sustainability report, keterbukaan data lingkungan dan tata kelola, serta ketersediaan informasi mengenai emisi karbon dan pajak yang dibayar. Dari total 77 perusahaan sektor energi, diperoleh 18 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen, serta interaksi variabel moderasi. Uji statistik meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), uji regresi berganda, dan uji interaksi moderasi. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi terbaru guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Green Accounting (GAG), Sustainability Report (SRT), dan Environmental Performance (EMP) memiliki nilai mean yang cukup tinggi, yang menandakan bahwa sebagian besar perusahaan sektor energi telah mengimplementasikan pelaporan dan pencatatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Namun, terdapat variasi yang cukup besar, khususnya pada skor Corporate Governance (CGE), yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan pada sektor ini masih belum merata. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pajak karbon (EPK), dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Ini mengindikasikan bahwa integrasi praktik keberlanjutan dalam pelaporan dan akuntansi lingkungan memberikan kontribusi nyata terhadap kepatuhan fiskal lingkungan di perusahaan energi.

Lebih lanjut, analisis moderasi menggunakan pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA) membuktikan bahwa corporate governance berperan penting dalam memperkuat hubungan antara green accounting dan efektivitas pajak karbon. Interaksi antara SRT dan CGE juga menghasilkan koefisien positif yang signifikan, yang artinya pelaporan keberlanjutan menjadi lebih efektif ketika perusahaan memiliki tata kelola yang baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Michelon et al. (2015), yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola menentukan kualitas pelaporan keberlanjutan. Selain itu, temuan ini mendukung teori legitimasi dan stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperoleh kepercayaan publik dan memenuhi harapan masyarakat agar tetap eksis. Dalam konteks ini, perusahaan sektor energi yang memiliki peran strategis dalam transisi energi nasional harus menunjukkan akuntabilitas yang tinggi, baik dalam pelaporan maupun dalam pengelolaan dampak lingkungan. Oleh karena itu, corporate governance tidak hanya menjadi elemen pendukung pelaporan keberlanjutan, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak efektivitas fiskal lingkungan seperti pajak karbon.

Selain dari sisi pelaporan, efektivitas pajak karbon juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data lingkungan yang digunakan sebagai dasar penghitungan. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan Environmental Performance yang tinggi cenderung lebih konsisten dalam menyusun data emisi karbon yang valid dan dapat diverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan tidak hanya tercermin pada pelaporan, tetapi juga dalam praktik operasional dan kebijakan internal perusahaan. Data PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi indikator penting dalam

menunjukkan kinerja lingkungan suatu perusahaan. Peringkat PROPER Emas atau Hijau menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan inovasi lingkungan melebihi kepatuhan, sedangkan peringkat Merah atau Hitam menandakan lemahnya kontrol terhadap dampak lingkungan. (Elkington, 1998) (Wiseman, 1982) (Pigou, 1920)

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas kebijakan fiskal berbasis lingkungan seperti pajak karbon, memerlukan integrasi antara sistem pelaporan, praktik akuntansi lingkungan, dan mekanisme pengawasan internal yang baik. Corporate governance menjadi instrumen penting untuk menjembatani kebijakan eksternal pemerintah dengan pengambilan keputusan internal perusahaan. Tanpa dukungan tata kelola yang memadai, pelaporan keberlanjutan hanya akan bersifat simbolis dan tidak memiliki dampak nyata terhadap pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi pemerintah dan kesiapan perusahaan dalam menerapkan sistem pelaporan dan akuntansi berbasis lingkungan.

H1: Green Accounting berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pajak Karbon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa green accounting memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pajak karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini memperkuat teori eksternalitas Pigou (1920), yang menyatakan bahwa biaya sosial dari aktivitas ekonomi harus diinternalisasi oleh pelaku usaha melalui mekanisme fiskal seperti pajak. Perusahaan yang menerapkan green accounting cenderung lebih transparan dalam mencatat biaya-biaya lingkungan seperti pengolahan limbah, emisi karbon, dan konservasi energi, sehingga dapat menghitung beban pajak karbon secara lebih akurat dan bertanggung jawab (Ditz, Ranganathan, & Banks, 1995) Green accounting juga memungkinkan perusahaan untuk menilai efektivitas kebijakan lingkungan secara kuantitatif, sehingga menjadi alat penting dalam merancang strategi pengurangan emisi. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya melihat pajak karbon sebagai beban fiskal, melainkan sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Christ & Burritt (2013) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi lingkungan mendukung perusahaan dalam merespons kebijakan fiskal berbasis lingkungan secara efisien dan terukur. Dengan demikian, hipotesis pertama **diterima**, yang berarti semakin baik penerapan green accounting, maka efektivitas pajak karbon dalam menekan emisi dan meningkatkan kepatuhan fiskal perusahaan akan semakin tinggi.

H2: Sustainability Report berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pajak Karbon

Sustainability report terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap efektivitas pajak karbon. Laporan keberlanjutan menyediakan informasi penting mengenai emisi karbon, kebijakan dekarbonisasi, dan penggunaan energi terbarukan, yang menjadi referensi utama bagi regulator maupun investor dalam menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan (GRI, 2021; Kolk, 2004). Semakin komprehensif dan akuntabel sustainability report yang disusun, maka semakin besar potensi pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan fiskal seperti pajak karbon. Dalam studi ini, perusahaan yang secara konsisten menyusun sustainability report dengan standar Global Reporting Initiative (GRI) menunjukkan tingkat kepatuhan pajak karbon yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pelaporan keberlanjutan bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas fiskal dan lingkungan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan Michelin, Pilonato, & Ricceri (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pengungkapan lingkungan dalam sustainability report berkorelasi positif dengan transparansi dan legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hipotesis kedua **diterima**, mengonfirmasi bahwa sustainability report yang baik dapat memperkuat efektivitas kebijakan pajak karbon, khususnya dalam sektor energi yang sangat terdampak oleh regulasi ini.

H3: Environmental Performance berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pajak Karbon

Analisis data menunjukkan bahwa kinerja lingkungan (environmental performance) berpengaruh positif terhadap efektivitas pajak karbon. Perusahaan yang mendapatkan peringkat tinggi dalam PROPER (seperti hijau atau emas) terbukti memiliki intensitas emisi yang lebih rendah dan pengelolaan dampak lingkungan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul cenderung lebih siap dalam menghadapi regulasi fiskal lingkungan seperti pajak karbon. Kinerja lingkungan yang baik mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam operasional bisnis, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Wiseman (1982) dan Clarkson et al. (2008) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berkontribusi terhadap reputasi dan efisiensi fiskal perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang berhasil menurunkan emisi karbonnya secara signifikan akan dikenai pajak yang lebih kecil karena dasar pengenaan pajaknya menurun. Dengan bukti empiris tersebut, hipotesis ketiga **diterima**, yang mengindikasikan bahwa environmental performance adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal karbon di sektor energi.

H4: Corporate Governance memperkuat pengaruh Green Accounting terhadap Efektivitas Pajak Karbon

Temuan penelitian menunjukkan bahwa corporate governance berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh green accounting terhadap efektivitas pajak karbon. Perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat seperti keberadaan dewan komisaris independen, komite audit aktif, dan sistem pengendalian internal mampu memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari sistem green accounting dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebijakan lingkungan dan fiskal perusahaan (Bhagat & Bolton, 2007; OECD, 2015). Dalam perusahaan dengan governance yang lemah, green accounting sering kali tidak digunakan secara strategis, melainkan hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Sebaliknya, perusahaan dengan governance yang baik menjadikan data lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan yang akuntabel, sehingga memperkuat efektivitas pajak karbon sebagai alat pengendalian eksternalitas. Oleh karena itu, hipotesis keempat **diterima**, dan hasil ini menegaskan bahwa tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas green accounting dalam konteks kebijakan fiskal lingkungan.

H5: Corporate Governance memperkuat pengaruh Sustainability Report terhadap Efektivitas Pajak Karbon

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa pengaruh sustainability report terhadap efektivitas pajak karbon menjadi lebih kuat pada perusahaan dengan tata kelola yang baik. Governance yang efektif memastikan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak hanya menjadi laporan publikasi, tetapi benar-benar mencerminkan upaya dan strategi perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan. Dengan adanya sistem pengawasan internal yang baik dan transparansi pelaporan yang tinggi, perusahaan mampu menyusun sustainability report yang lebih akurat, lengkap, dan relevan. Michelon, Pilonato, & Ricceri (2015) menyebutkan bahwa governance yang baik mendorong kualitas pelaporan ESG dan memperkecil kemungkinan praktik greenwashing. Dalam konteks ini, sustainability report menjadi sarana strategis untuk menunjukkan kepatuhan terhadap pajak karbon dan komitmen pada keberlanjutan. Dengan demikian, hipotesis kelima **diterima**, yang berarti corporate governance secara signifikan memperkuat pengaruh sustainability report terhadap efektivitas pajak karbon.

H6: Corporate Governance memperkuat pengaruh Environmental Performance terhadap Efektivitas Pajak Karbon

Corporate governance juga memperkuat hubungan antara environmental performance dan efektivitas pajak karbon. Perusahaan dengan governance yang kuat cenderung mengelola kinerja lingkungan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga lebih mampu menginternalisasi biaya eksternalitas melalui pajak karbon. Jaggi et al. (2018) menyatakan bahwa struktur tata kelola yang baik akan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan lingkungan, serta memfasilitasi pencapaian target emisi secara konsisten. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang kuat juga lebih tanggap terhadap kebijakan pemerintah dan ekspektasi stakeholder, sehingga pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban hukum, melainkan juga strategi bisnis. Temuan ini konsisten dengan Wang et al. (2023) dan Amran et al. (2014), yang menyatakan bahwa tata kelola yang efektif dapat memperkuat dampak positif dari kinerja lingkungan terhadap respons perusahaan terhadap kebijakan fiskal berbasis lingkungan. Dengan demikian, hipotesis keenam **diterima**, dan mempertegas bahwa corporate governance memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara kinerja lingkungan dan efektivitas pajak karbon.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan green accounting, penyusunan sustainability report, dan pencapaian environmental performance memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pajak karbon. Ketiga variabel tersebut tidak hanya memengaruhi transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mencerminkan kesiapan perusahaan terhadap kebijakan fiskal berbasis lingkungan.

Lebih lanjut, corporate governance terbukti menjadi variabel moderasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan efektivitas pajak karbon. Tata kelola yang baik memastikan bahwa data lingkungan dikelola dan dilaporkan dengan benar, serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan fiskal dan keberlanjutan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang mendorong keterbukaan data lingkungan dan akuntansi hijau sebagai bagian dari strategi fiskal negara. Bagi perusahaan, hasil ini menegaskan pentingnya membangun sistem pelaporan dan pengawasan yang kredibel demi kelangsungan bisnis dan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditz, D., Ranganathan, J., & Banks, R.D. (1995). *Green Ledgers: Case Studies in Corporate Environmental Accounting*. World Resources Institute.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI Standards*.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. *Critical Perspectives on Accounting*, 59-78.
- Pigou, A. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan.
- Saputra, M., & Windyastuti. (2024). The Effect of Green Accounting Implementation, Sustainability Report, Asymmetric Information, and Financial Performance on Firm Value. *Utsaha: Journal of Entrepreneurship*.
- Wiseman, J. (1982). An evaluation of environmental disclosures made in corporate annual reports. *Accounting, Organizations and Society*, 53-63.